

SEMUA DAERAH DITERAPKAN PPKM LEVEL 4

Penyekatan Jalan Mulai Dibuka

YOGYA (KR) - Keputusan pemerintah pusat untuk memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, dari 3 - 9 Agustus, sebetulnya jika dilihat dari sisi aturan tidak jauh berbeda dari sebelumnya. Karena semua kabupaten / kota di DIY belum mengalami penurunan level, atau masih di level 4. Jadi aturan dalam kebijakan tersebut relatif masih sama.

"Begitu pemerintah pusat mengumumkan untuk memperpanjang kebijakan PPKM level 4, kami langsung mempelajari kebijakan perpanjangan yang dimuat dalam Instruksi Mendagri. Nampaknya perpanjangan level 4 ini tidak berbeda dibanding kemarin waktu PPKM level 4. Saya kira kita tetap melanjutkan saja seperti kemarin. Karena salah satu tujuan dari PPKM adalah untuk menekan mobilitas, saya minta semua pihak mentaati aturan yang ada dengan sebaik-baiknya," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Drs K Baskara Aji di ruang kerjanya, Selasa (3/8). Baskara Aji mengatakan, meski ada sedikit pelong-

garan, aktivitas ekonomi masyarakat dalam perpanjangan PPKM ini masih dibatasi. Misalnya terkait jam operasional tempat usaha maksimal hingga pukul 20.00 WIB malam dan mal yang belum diizinkan untuk buka. Sedangkan restoran diperkenankan membuka layanan makan di tempat asal waktu makan dibatasi sebanyak 20 menit.

"Kalau untuk aturan makan di tempat di rumah maksimal tetap maksimal 20 menit. Sementara untuk sejumlah ruas jalan, yang sebelumnya ada penyekatan, kini dibereskan titik sudah mulai dibuka. sebenarnya kebijakan itu tidak diatur dalam Instruksi Kementerian Da-

lam Negeri maupun Instruksi Gubernur DIY. Jadi langkah itu merupakan inisiatif pemerintah setempat dalam upaya membatasi mobilitas warganya," terangnya.

Komentar senada diungkapkan oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan, soal kebijakan perpanjangan PPKM sebetulnya tidak banyak perubahan. Selain semua kabupaten/kota di DIY masih masuk dalam PPKM, sejumlah pembatasan masih dilakukan dalam perpanjangan kali ini. Semua itu dilakukan untuk menekan mobilitas di masyarakat.

Terpisah Ketua Umum DPD Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI)



KR-Surya Adi Lesmana

Meski penyekatan di sejumlah jalan mulai dibuka, namun di Jalan Margo Utomo (Tugu) hingga kemarin masih ditutup. Tampak sejumlah pesepeda memanfaatkan celah sempit untuk bisa melintasi jalan tersebut.

DIY Bobby Ardyanto Setya Aji menyampaikan, rekomendasi penerapan regulasi perpanjangan PPKM Level 4 diharapkan dilengkapi dengan kebijakan dan solusi. Hal itu agar industri serta masyarakat dapat bertahan dan implementatif terhadap

regulasi ini. Selanjutnya, pemberian bantuan atau stimulus langsung kepada pelaku industri dan profesi, berupa pengurangan beban biaya tetap maupun biaya tidak tetap.

"Program kegiatan pemerintahan yang sudah diang-

garkan dapat menggunakan jasa pelayanan anggota DPD GIPI DIY sebagai bentuk supporting pemerintah terhadap industri pariwisata DIY. Kemudian pelatihan dan pendampingan pengembangan kapasitas industri maupun profesi agar lebih

siap dalam menghadapi PPKM Level empat," paparnya.

Bobby menambahkan rekomendasi berikutnya pembuatan forum komunikasi interaktif dua arah antara pelaku industri pariwisata melalui asosiasi bersama Pemda DIY. Implementasi PPKM Level 4 secara tegas dan konsisten dengan monitoring dan evaluasi yang terstruktur serta melanjutkan program Work from Jogja dan Jogja Travel Corridor sebagai bentuk upaya recovery pariwisata DIY yang aman dan terkontrol.

"Rekomendasi tersebut sudah kami serahkan secara tertulis kepada Gubernur DIY. Kami berharap angka kasus Covid-19 segera turun dengan adanya beberapa support dengan vaksinasi bagi pelaku wisata serta melalui sinergi banyak pihak terutama di bidang pariwisata supaya dapat membuat pariwisata survive serta bangkit kembali," terangnya. (Ria/Ira)-f

KAGAMA DIY GALANG DONASI Tinggi, Kebutuhan Peti Mati

YOGYA (KR) - Seiring dengan tingginya tingkat kematian akibat terpapar virus Korona (Covid-19), maka tingkat kebutuhan peti mati di rumah-rumah sakit juga tinggi. Karena itulah Pengurus Daerah Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada Daerah Istimewa Yogyakarta (Pengda Kagama DIY) melakukan penggalangan dana sosial untuk membantu peti mati.

"Pada kesempatan ini kami menyerahkan bantuan 15 peti mati kepada RSUD Kota Yogyakarta dari donasi tersebut," kata Prof Dr dr KRT Adi Heru Husodo didampingi Kinorika saat mewakili Pengda Kagama DIY menyerahkan peti mati kepada RSUD Kota Yogyakarta yang diterima Fajar Nugroho (Kasubbag TU) di kompleks pool Damkar UGM Bulaksumur, Senin (2/8).

Menurut Prof Adi Heru, sesuai ajaran agama Islam, kalau ada orang meninggal agar disegerakan pemakamannya. Namun untuk itu dibutuhkan peti, khususnya untuk para korban Covid-19. Karena itu bantuan peti mati ini sangat dibutuhkan.

Hal senada disampaikan Fajar Nugroho. Karena itu bantuan peti mati ini akan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. "Kami memang membutuhkan banyak peti mati," katanya.

Dijelaskan, belakangan ini RSUD Kota Yogyakarta yang berlokasi di Wirosaban Umbulharjo setiap harinya membutuhkan lebih dari 10 unit, bahkan pernah lebih dari 20. Hal ini karena RSUD Kota Yogyakarta tidak hanya melayani pasiennya saja yang meninggal, tetapi juga para korban Covid-19 yang isoman dan ber-KTP Yogya. (Fie)-f



KR-Luthfie

Prof KRT Adi Heru didampingi Kinorika dari Pengda Kagama DIY secara simbolis menyerahkan bantuan peti mati untuk RSUD Kota Yogyakarta.

Pascareformasi, Partai Alami 'Pembiruan'

YOGYA (KR) - Perjalanan kehidupan partai politik pascareformasi di Indonesia mengalami suatu ironi. Pasalnya, partai-partai baru yang lahir setelah reformasi justru mengalami pembiruan. Maksudnya adalah mengutamakan edarah biru alias keturunan/kekerabatan atau menjadi dinasti. Ada kepemimpinan partai dari bapak kepada anaknya dengan mudah, ada kepemimpinan diteruskan besan dan lainnya. Sementara yang lama, sudah lebih dulu menjadi dinasti.

Ketua Umum MPP Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Dr Jimmly Assiddiqie mengemukakan hal tersebut dalam diskusi Kebangsaan dan Keumatan dengan ICMI Orwil Yogya, Senin (2/8) sore. Diskusi dibuka Ketua ICMI Orwil Yogyakarta, Herry Zudianto.

Jimmly tidak menolak kemungkinan bahwa partai-partai lain juga akan mengalami seperti itu, kecuali yang benar-benar rasional. Ironisnya, yang rasional juga mengalami perpecahan. "Artinya, memang ada masalah internal demokrasi dalam partai politik. Karenanya memang harus ada pemisahan konflik kepentingan antara

bisnis dan politik," tandasnya.

Pakar hukum tatanegara ini menegaskan, bila kita tidak bisa lagi menggunakan cara lama terbagi dalam eksekutif, legislatif dan yudikatif. Karena sekarang mikro dan makro harus dipisah dan kalau tidak menurut Jimmly akan terjadi totalitarianisme baru. Menurut Jimmly, tidak ada demokrasi karena *state, civil society*, dunia usaha dan media berada di tangan satu orang.

"Jadi menyedihkan, akal sehat dan tulus dalam kehidupan politik yang kian praktis ini kalah dengan akal bulus dan fulus," tambahna.

Jimmly mengemukakan, kita perlu kasih kepada pemerintah sekarang karena apa yang dilakukan, disalahkan. "Karena itu, tidak boleh lagi apalagi dibuat tiga periode," ujarnya. Meski demikian, semua harus menyiapkan mana sumber daya, strategi dan lainnya yang bisa diperbaiki pascapandemi. Sebab, lanjutnya, pandemi tidak akan secepat itu penyelesaiannya.

Indonesia, katanya, bukan negara sekuler namun juga tidak hanya satu agama. Karena itulah terdapat Menteri Agama dan ada Sila Ketuhanan

Yang Maha Esa. Menteri Agama tampak lebih banyak mengurus Islam bukan semata mayoritas, namun karena ada pelaksanaan haji yang menjadi urusan negara. Meski dalam keagamaan ini menurut Jimmly ada empat penting dalam berbangsa.

Pertama, adalah kenyataan bila Republik Indonesia itu plural. Sehingga harus saling mengakui keberadaan dan menghormati. Kedua, ada kecenderungan watak eksklusif dan hidup dalam kotak sendiri. Sehingga menurut Ketum ICMI perlu inklusivisme masyarakat, sebagai sebuah pembaruan. "Ketiga, ada Islam Nusantara, Islam moderat, *Islam wasatiyah* dan Islam *rahmatan lil alamin*. Tiga pertama ini ada plus minus. Karenanya saya cenderung kita menjadi Islam *rahmatan lil alamin*, rahmat untuk semua," jelasnya.

Yang terakhir menurut Jimmly, nasionalisme keagamaan harus dibungkus di bawah Konstitusi berdasar kesepakatan. Ketika Indonesia dilahirkan, *founding fathers* sebagai wakil kita telah bersepakat dalam kesatuan kenegaraan yang dibingkai Pancasila dan UUD. (Fsy)-f

BERHARAP SEGERA PEROLEH TAMBAHAN VAKSIN

Ketersediaan Menipis, Fokus Suntikan Dosis Kedua

YOGYA (KR) - Seperti halnya daerah lain, Kota Yogya kini fokus untuk menuntaskan penyuntikan dosis kedua bagi warga yang telah mendapatkan dosis pertama. Perubahan strategi ini lantaran ketersediaan jumlah vaksin di gudang penyimpanan yang semakin menipis.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Ariyani, menjelaskan permohonan penambahan vaksin melalui Pemda DIY maupun langsung ke pusat sebenarnya sudah dilakukan. Akan tetapi pihaknya masih menunggu distribusi tambahan vaksin. "Persediaan di gudang farmasi sekitar 11.000 dosis vaksin Sinovac ditambah dosis di puskesmas, rumah sakit, dan klinik yang melayani vaksinasi," katanya, Selasa (3/8).

Total kebutuhan vaksin untuk menuntaskan pemberian vaksinasi dosis kedua hingga akhir Agustus mencapai 51.000 dosis. Stok yang ada sekarang pun masih belum mampu mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu tambahan ketersediaan dari pusat sangat diharapkan.

Menurut Emma, proses pengajuan permohonan penambahan stok vaksin harus dilakukan secara berjenjang yaitu melalui Pemda DIY. Kota Yogya sudah mengajukan permohonan penambahan 100.000 dosis vaksin disusul pengajuan 240.000 dosis vaksin.

Emma mengungkapkan, permohonan penambahan vaksin yang cukup banyak tersebut ditujukan untuk percepatan penyelesaian vaksinasi pada Agustus melalui program Jogja Merdeka Vaksin. Targetnya minimal 70 persen penduduk Kota Yogya sudah divaksinasi pada 17 Agustus. "Karena stok menipis, maka untuk saat ini perlu dilakukan perubahan strategi vaksinasi. Tidak hanya mengejar vaksinasi dosis pertama tetapi lebih mengutamakan menyelesaikan dosis kedua terlebih dulu," imbuhnya.

Sementara pengajuan tambahan dosis vaksin tersebut tidak hanya untuk vaksin Sinovac tetapi juga AstraZeneca. Hal ini karena penerima vaksin jenis tersebut harus segera melakukan

vaksinasi dosis kedua pada pertengahan Agustus. "Mudah-mudahan hari ini sudah ada tambahan stok untuk AstraZeneca," tandasnya.

Hingga saat ini, jumlah warga Kota Yogya yang sudah mendapat vaksinasi mencapai sekitar 127.000 orang dari sekitar 350.000 warga berusia 12 tahun ke atas yang boleh menerima vaksinasi. Sementara itu, Walikota Yogya Haryadi Suyuti, berharap agar ada kebijakan khusus untuk Kota Yogya terkait distribusi vaksin. Hal ini karena Kota Yogya sangat gencar melakukan vaksinasi. "Distribusi vaksin tentunya harus disesuaikan dengan program vaksinasi yang berjalan di daerah. Jika programnya dilakukan agresif dan gencar, maka membutuhkan persediaan vaksin dalam jumlah banyak," katanya.

Kota Yogya melalui gerakan Jogja Merdeka Vaksin menargetkan mampu melakukan vaksinasi untuk sekitar 11.000 warga setiap hari. Sehingga pada 17 Agustus mendatang setidaknya 70 persen warga sudah mendapat vaksin. (Dhi)-f

KEPENGURUSAN KEMBALI DIPERPANJANG

Tugas Berat, Honor RT/RW Diusulkan Naik

Pemkot atas jasa yang diberikan dalam melayani warga. Akan tetapi dengan kondisi saat ini patut untuk dievaluasi, terutama menyangkut nominal yang wajar seiring beban tugasnya selama pandemi. Dirinya pun mengusulkan agar honor tidak lagi dihitung tiap tiga bulan melainkan per bulan. "Besarnya juga bisa ditambah menjadi Rp 500.000 per bulan. Minimal untuk Ketua RT atau RW, sedangkan pelayanan masyarakat lainnya bisa disesuaikan lagi," usulnya.

Total ada 617 RW dan 2.535 RT di Kota Yogya. Kepengurusan periode 2018-2021 sedianya berakhir pada 31 Maret 2021 lalu kemudian diperpanjang enam bulan atau hingga 30 September 2021 melalui Instruksi Walikota Nomor 1/2021. Perpanjangan tersebut dengan pertimbangan kondisi pandemi sehingga perlu upaya pencegahan dan penanganan secara optimal melalui peran serta aktif pengurus RT dan RW se Kota Yogya.

Kepengurusan RT dan RW saat ini pun kembali diperpanjang hingga tiga bulan atau 31 Desember 2021 melalui Instruksi Walikota

Nomor 16 Tahun 2021. Dasar perpanjangan tersebut juga masih sama, yakni kiprah pengurus RT dan RW yang sangat dibutuhkan selama penanganan pandemi Covid-19.

Dwi Candra mengakui, menjadi pengurus RT maupun RW merupakan wujud pengabdian. Tidak jarang banyak pengurus yang selalu dipilih oleh warga hingga beberapa kali periode. Namun pemberian honor tersebut bukan berarti mengikis nilai pengabdian pengurus RT maupun RW melainkan harus diartikan sebagai bentuk terima kasih dari pemerintah. "Kalau dari sisi nominal memang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan kiprah yang sudah diberikan. Tetapi kita berharap sistem penanganan pandemi dapat terkoordinasi dengan baik dari tingkat kota hingga unsur paling bawah di tataran RT," urainya.

Kebijakan untuk menaikkan honor pelayan masyarakat itu pun, imbuhnya, menjadi kewenangan penuh pemerintah. Pihaknya di lembaga legislatif tentunya akan mendukung proses penganggaran, baik melalui perubahan APBD tahun ini maupun anggaran tahun depan. (Dhi)-f

EFEKTIVITAS PPKM DIEVALUASI

Penurunan Kasus Covid-19 Belum Signifikan

YOGYA (KR) - Selama penerapan kebijakan PPKM Darurat maupun PPKM Level 4, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya menyebut ada penurunan kasus Covid-19. Akan tetapi tren penurunan tersebut masih belum terlalu signifikan.

Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya Haryadi Suyuti, menyebut pihaknya akan berjalan seirama dengan keputusan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi. "Kemarin PPKM Darurat, kemudian berganti dengan PPKM Level 4 sampai hari ini (kemarin). Nanti seperti apa PPKM-nya, kita ikuti. Yang jelas kalau trennya sudah menurun," ungkapnya, Senin (2/8).

Penurunan kasus tersebut tidak sebatas pertumbuhan temuan kasus baru harian melainkan juga kasus kematian turut mengalami penurunan. Akan tetapi diakuinya polanya masih stabil tinggi sehingga penurunannya belum bisa diklaim signifikan.

Oleh karena itu, pihaknya tidak akan terjebak pada periodisasi pelaksanaan PPKM melainkan bagaimana kebijakan tersebut mampu menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Terutama menyangkut pembatasan kegiatan masyarakat sesuai ruh PPKM. "Intinya kan masyarakat harus bisa saling menjaga. PPKM itu harus dibiasakan supaya mampu

menjadi *habit*. Jika substansinya dijalankan betul, insya Allah akan terkendali," tandasnya.

Kendati demikian, Satgas Penanganan Covid-19 Kota Yogya tetap melakukan evaluasi atas efektivitas PPKM yang tengah digulirkan. Pemerintah pusat harapannya mampu melihat perkembangan kasus di DIY secara komprehensif. Hal ini karena kondisi di tingkat kabupaten dan kota tidak sama.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogya Emma Rahmi Ariyani, menambahkan berdasarkan evaluasi terhadap perkembangan kasus selama Juli lalu, puncaknya terjadi pada 4-10 Juli. Selanjutnya jumlah temuan kasus harian mengalami penurunan dan konsisten di bawah 200 kasus perhari. "Sebenarnya banyak temuan kasus itu ada baiknya karena bisa langsung dilakukan perawatan maupun menjalani isolasi mandiri sehingga potensi penularannya dapat dicegah. Sebagian besar itu kan tidak mengalami gejala," urainya.

Penurunan jumlah kasus baru tersebut turut berdampak pada semakin berkurangnya angka kematian atau pasien yang meninggal dunia. Akan tetapi tren penurunan angka kematian baru terjadi sejak pekan lalu atau 29 Juli 2021. (Dhi)-d